

JURNAL

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
PEKERJA DI PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company)
PEMATANGSIANTAR**



Diajukan oleh :

FRENDY VICTOR SILALAH

NPM : 110510750

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

FAKULTAS HUKUM

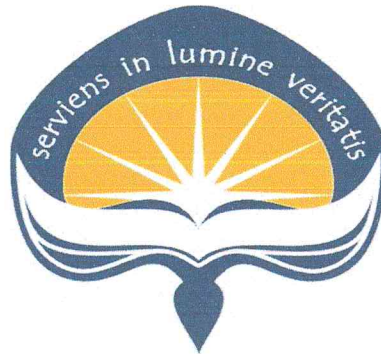
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI
PEKERJA DI PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company)
PEMATANGSIANTAR**



Diajukan oleh :

FRENDY VICTOR SILALAH

NPM : 110510750
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Pada tanggal 2016

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PELAKSANAAN KESELAMTAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) PEMATANGSIANTAR

Oleh

Frendy Victor Silalahi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
victorsilalahi93@gmail.com

ABSTRACT

Every worker has right for health and safety in the working place such as companies, corporation and so on. The aims of this study is to analyze how the implementation of occupational health and safety workers in PT STCC (Sumatra Tobacco Trading Company). This study are using empirical law study that focused on the behavioural of legal community. This study is held at Mei-Juni 2015 in Pematangsiantar, North Sumatera. The data was collected by direct interview with respondents. The assessment of this study are using primary and secondary legal protocol. The result of this study shown that job training for workers are not conducted completely, there is no specifically accommodation or transport guard for workers who getting accident in workplace, incompletely protective equipment for workers, overlimitedworktime and there is no health insurance for all of the workers. The conclusion of this study is the implementation of occupational of health and safety workers should be reexamined in PT STTC Pematangsiantar.

Keywords : Empricial study, Health and Safety workers, PT.STTC Pematangsiantar, Legal community

PENDAHULUAN

Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 86 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) juga mengatur bahwa : setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada era globalisasi perkembangan yang sangat pesat ini pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya seringkali menemui berbagai hambatan serta resiko-resiko yang dapat mengurangi kemampuan mereka dalam bekerja. Keberadaan pekerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik agar pekerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan suatu pelaksanaan kerja yang optimal sesuai dengan harapan bersama para pihak, disetiap perusahaan tentu ada upaya keselamatan yang diberikan bagi pekerja. Beberapa peristiwa yang terjadi akibat rendahnya perhatian perusahaan terhadap keselamatan kerja dan kesehatan pekerja merupakan hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ratusan kasus yang terjadi disuatu perusahaan. Maka dari itu saya mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) Pematangsiantar.

TINJAUAN PUSTAKA

kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu memb

1. Tinjauan Tentang PT.STTC

Perseroan terbatas (PT) berasal dari bahasa Belanda "*Naamloze Vennootschap*", yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual-belikan, perubahan ubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.¹

PT STTC merupakan perusahaan rokok yang terdapat di Kota Pematangsiantar tepatnya di jalan Pdt. Justin Sihombing nomor 43. PT. STTC memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pemerintah kota pematangsiantar pada umumnya, berupa pajak dan cukai rokok dan juga kepada masyarakat pematangsiantar pada khususnya. Hal ini dapat terlihat bahwa PT STTC memiliki karyawan sebanyak 5.000 orang, kesemuanya karyawan yang ada di perusahaan ini merupakan warga pematangsiantar.

2. Tinjauan tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari proses produksi barang maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatnya intensitas kerja yang berimbas pada meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal tersebut juga membawa dampak makin tingginya tuntutan untuk mencegah kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, perkembangan aturan mengenai Ketenagakerjaan juga semakin tampak. Alah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969

tentang Pokok-Pokok mengenai tenaga Kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur lebih mendalam mengenai Keselamatan dan Kecelakaan Kerja.

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dilihat secara filosofi maupun keilmuan. Secara filosofi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohani manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya serta hasil karya dan budayanya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sedangkan secara keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi pencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.²

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.³

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik

1

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas#Pembagian (diakses tgl 07 mei, 10:48)

² Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, Jakarta, hlm.36.

³ Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2011, *Hukum Perburuhan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.170.

secara langsung maupun tidak langsung. Usaha-usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dan kepentingan bersama semua pihak, yaitu pihak pengusaha, pekerja/buruh, maupun pemerintah. Usaha-usaha tersebut pada dasarnya telah tersirat dan tersurat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

a) Tujuan umum

- 1) Melindungi tenaga kerja ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerja.
- 2) Melindungi setiap orang lain yang berada di tempat kerja yang selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- 3) Melindungi bahan dan peralatan produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien.

b) Tujuan khusus

- 1) Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
- 2) Menciptakan mesin, instalasi, pesawat, alat bahan, dan hasil produksi.
- 3) Menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau antara manusia dengan pekerjaan.⁴

Syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses terjadinya;
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Menurut penjabaran pasal tersebut yang termasuk dalam hal keselamatan kerja ada pada poin a, b, c, d, e, f, n, o, p, q, dan r, sedangkan yang termasuk dalam hal kesehatan kerja ada pada poin g, h, i, j, k, l, m, dan n.

Mangku Negara menerangkan, bahwa tujuan dan manfaat dari

⁴Yayasan kesejahteraan, Op.Cit., hlm 36

keselamatan dan kesehatan kerja adalah, sebagai berikut :

- a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
- b. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
- c. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
- e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
- f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.⁵

Tujuan dan manfaat kesehatan dan keselamatan kerja tidak akan terealisasi bila hanya bertopang pada tenaga kerja tanpa diikuti oleh peran perusahaan dan pemerintah. Perusahaan sebagai pihak yang memberikan pekerjaan tentulah harus menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerja.

a. Keselamatan kerja

Keselamatan kerja bertalian dengan adanya suatu kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja ataupun di suatu tempat dimana tempat tersebut menjadi tujuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas rekomendasi dari pusat tempat tempat kerja. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja definisi keselamatan kerja:

“ialah keselamatan kerja dalam segala hal tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara,

yang berda di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan kerja terjadi, yaitu :

- 1) Faktor manusia, misalnya dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan suatu alat industri.
- 2) Faktor material/ alat/ bahan, dikarenakan tidak menggunakan bahan yang seharusnya sehingga dapat menimbulkan suatu kecelakaan.
- 3) Faktor bahaya/ sumber bahaya, dikarenakan dua sebab yaitu, perbuatan berbahaya serta kondisi/ keadaan berbahaya.
- 4) Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mengenai mesin-mesin atau peralatan yang digunakan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Akibat yang ditimbulkan dari suatu kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 hal, yaitu :

a. kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain :

- 1) Kerusakan mengenai bahan, alat mesin dan bangunan
- 2) Biaya pengobatan dan perawatan korban
- 3) Tunjangan kecelakaan
- 4) Hilangnya waktu kerja
- 5) Menurunnya jumlah maupun mutu produksi, dan lain-lain.

b. kerugian yang bersifat non ekonomis, yang pada umumnya berkaitan dengan tenaga kerja itu sendiri baik itu berupa kematian, luka/cidera berat maupun ringan.

⁵ Prabu A Mangkunegara, 2002, *Evaluasi Kerja SDM*, Refika Aditama, Bandung, hlm.165.

Adapun tujuan dari keselamatan kerja adalah :⁶

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan
- 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaba, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- 9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- 14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

- 16) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Menurut Soeprihanto⁷ ada dua langkah perlindungan keselamatan kerja yang harus dijalankan oleh perusahaan, yakni:

- a. Usaha preventif atau pencegahan, yakni mengendalikan atau menghambat sumber bahaya yang terdapat di lingkungan tempat kerja sehingga dapat mengurangi atau tidak menimbulkan bahaya bagi para karyawan.
- b. Usaha represif atau kuratif, yakni mengatasi kejadian atau kecelakaan yang disebabkan oleh sumber-sumber bahaya yang terdapat di tempat kerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada prinsipnya bukan hanya tanggungjawab tenaga kerja tetapi juga perusahaan yang memberikan pekerjaan. Hal ini dibutuhkan agar tercipta produktivitas yang baik dalam perusahaan dan meminimalisir terjadi masalah dalam lingkungan kerja.

b. Kesehatan Kerja

Imam Soepomo berpendapat bahwa keselamatan kerja merupakan aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan keselamatan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam seluruh hubungan kerja.⁸ Undang-undang

⁶ Ruth Sahanaya Pane, 2014, "*Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Hotel GRAND QUALITY YOGYAKARTA*", S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UAJY, hlm35.

⁷J.Soprihanto,2002,*Manajemen Personalia*,Penerbit BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, hlm48.

⁸ Imam Soepomo, 1989, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Djambatan, Jakarta, hlm.2.

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial dan ekonomis. Dalam Pasal 4 juga disebutkan, bahwa setiap orang mempunyai hak sama dalam memperoleh kesehatan optimal.

Pengertian Kesehatan Kerja menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu :

“untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.”

Sumakmur menyatakan bahwa Kesehatan kerja adalah Spesialisasi dalam ilmu kesehatan/ kedokteran beserta prakteknya, agar pekerja/masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik maupun mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit-penyakit umum.⁹

Tujuan dari Kesehatan kerja adalah :

- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik mental, maupun sosial
- 2) Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
- 3) Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan produktivitas kerja.

⁹ Sumamur.P.K, 1992, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV. Haji Masagung, Jakarta, hlm1.

Adapun sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja adalah:¹⁰

- 1) Faktor fisik berupa:
 - a) Suara yang terlalu bising
 - b) Suhu yang terlalu tinggi atau rendah
 - c) Radiasi, dll.
- 2) Faktor kimia berupa:
 - a) Gas/uap
 - b) Cairan yang bersifat racun, dll
- 3) Faktor biologis berupa:
 - a) Bakteri
 - b) Virus
 - c) Jamur, dll
- 4) Faktor fatal berupa :
 - a) Kondisi badan yang tidak baik pada saat bekerja
 - b) Gerak kerja yang senantiasa berdiri atau duduk
 - c) Beban kerja yang melampaui batas kemampuan
 - d) Peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan
- 5) Faktor psikologis berupa :
 - a) Kerja yang terpaksa atau dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan
 - b) Suasana kerja yang tidak menyenangkan
 - c) Pikiran yang cenderung mudah menimbulkan kecelakaan
 - d) Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan, dll.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mengatur tentang :

- 1) Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
- 2) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.

¹⁰ Sendjun H.Manullang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 87-91.

- 3) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
- 4) Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Undang-undang No. 23 tahun 1992 menunjukkan bahwa faktor kesehatan kerja ini akan sangat berpengaruh pula dalam mewujudkan produktivitas kerja supaya dapat berjalan secara efektif dan maksimal di dalam sebuah Perusahaan. Hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja merupakan kepentingan yang dilindungi berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah : data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹¹

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer : berupa Peraturan Perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹² Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur dan website yang terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT.STTC Pematangsiantar, serta hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara. Metode kuisioner dilakukan dengan

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi 1-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 195-196.

mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisisioner yang telah disusun tentang obyek yang diteliti baik bersifat terbuka maupun tertutup. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, jurnal, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menggunakan Undang-Undang yang mengatur tentang tenaga kerja kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT.STTC yang beralamat di Jalan Pendeta Justin Sihombing No.43, Pematangsiantar. Dengan dasar pertimbangan bahwa tempat tersebut memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, wakru, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

b. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *proposive sampling*. *Proposive sampling* menurut Sugiyono¹³ adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri.¹⁴ Responden dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh PT.STTC yang bekerja dibagian produksi. Pertanyaan dalam bentuk kuesioner dibagikan peneliti kepada 10% dari populasi pekerja/buruh yang bekerja dibagian produksi. Dari 25 kuesioner yang dibagikan kepada pekerja/buruh yang dianggap memenuhi kriteria *proposive sampling*, hanya delapan kuesioner yang kembali pada peneliti. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan data dari delapan pekerja/buruh tersebut.

b. Narasumber adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara.

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah :

- 1) Kepala Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan

¹³Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 122.

¹⁴Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

- Transmigrasi
Pematangsiantar.
- 2) Kepala Jamsostek
Pematangsiantar.
- 3) PT.STTC.

7. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁵ Penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dapat digambarkan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT.STTC, seperti berikut :

Bahwa pada poin :

- a) Pengaturan sirkulasi udara;
- b) Pemeliharaan gedung;
- c) Kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja;
- d) Pencegahan timbulnya penyakit kerja;
- e) Pertolongan pertama pada kecelakaan,

Keseluruhan poin tersebut sudah terlaksana sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Namun pada poin :

- a) Pelatihan kerja;
- b) Transportasi khusus ketika terjadi kecelakaan kerja;
- c) Penerapan pemeliharaan gizi dan kesehatan;
- d) Jaminan kesehatan;

e) Jam kerja yang masih melebihi batas. Keseluruhan poin tersebut pelaksanaannya masih belum sesuai dengan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja di PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) Pematangsiantar dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja di PT.STTC (Sumatra Tobacco Trading Company) Pematangsiantar belum berjalan cukup baik, seperti pelatihan kerja yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan pada setiap pekerja/buruh; tidak adanya transportasi jaga secara khusus ketika terjadi kecelakaan kerja; belum adanya alat pelindung diri bagi sebahagian pekerja/buruh; kurang tepatnya cara penerapan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan dan gizi pekerja; jam kerja yang masih melebihi batas yang seharusnya; dan belum adanya pemberian jaminan kesehatan secara menyeluruh terhadap pekerja/buruh kontrak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar hendaknya lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan banyak pekerja/buruh.
2. PT.STTC lebih memperhatikan dan memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban perusahaan, seperti pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 47.

3. Diharapkan bagi pekerja/buruh di kota Pematangsiantar berperan lebih aktif, apabila merasa pada saat kerja berlangsung hak-haknya sebagai pekerja/buruh tidak terpenuhi.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2011, *Hukum Perburuhan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta.

Imam Soepomo, 1989, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan*, Djambatan, Jakarta.

J.Soprihanto, 2002, *Manajemen Personalial*, Penerbit BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Prabu A Mangkunegara, 2002, *Evaluasi Kerja SDM*, Refika Aditama, Bandung.

Ruth Sahanaya Pane, 2014, “*Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Hotel GRAND QUALITY YOGYAKARTA*”, S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UAJY.

Sendjun H.Manullang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi 1-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.

Sumamur.P.K, 1992, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Yayasan Kesejahteraan Keluarga dan Pekerja Indonesia, 2000, *Pedoman Teknis Pengoperasian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Supervisor*, Jakarta.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas#Pembagian (diakses tgl 07 mei, 10:48)